

BAB I

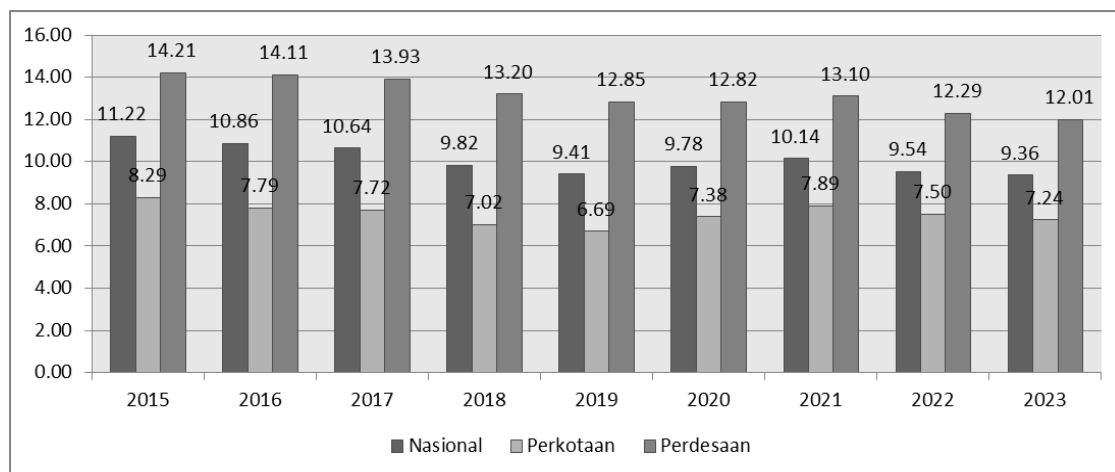
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dunia kerap diidentikkan dengan wajah kemiskinan perdesaan, ini merupakan tantangan kemiskinan secara global yang berupaya menggambarkan fenomena luar biasa dari kemiskinan perdesaan terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (negara berkembang). Diperkirakan ada 1,2 miliar orang miskin (hidup dengan \$1,25 atau kurang setiap hari) menjalani kehidupan di perdesaan, mewakili sekitar 75 persen orang yang berada dalam kemiskinan ekstrem secara global (Anríquez & Stamoulis dalam Rodríguez-Pose dan Hardy, 2015). Ini senada yang dikemukakan The World Bank (2018) bahwa jika kemiskinan dilihat dengan lensa multidimensi maka distribusi kemiskinan akan lebih condong ke wilayah perdesaan, dengan fakta rumah tangga perdesaan secara kumulatif mengalami lebih banyak keterbatasan akses terhadap berbagai utilitas penting dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan.

Secara global angka kemiskinan di perdesaan mencapai tiga kali lipat (17,2 persen) dari perkotaan (5,3 persen). Rumah tangga miskin perdesaan di negara berkembang umumnya berukuran besar (memiliki banyak anak), berpendidikan rendah, dominan bekerja di sektor pertanian dan sebagian kecil di sektor non-pertanian atau industri skala mikro-kecil (The World Bank, 2018). Masyarakat miskin perdesaan juga rentan terhadap risiko perubahan cuaca, kesehatan, pasar, investasi, dan kebijakan publik (Khan, 2000). Keterbatasan akses terhadap sumber daya, aset, dan pasar dalam kondisi kenaikan harga (inflasi) dapat dengan mudah melemahkan daya beli masyarakat miskin di perdesaan. Selain itu, kelompok rentan miskin (*near poor*) berisiko terseret kembali ke dalam kemiskinan akibat tekanan ekonomi yang semakin meningkat (Bell and Rich, 1994 dan Agussalim, 2011).

Dalam perhitungan tingkat kemiskinan nasional, wilayah perdesaan Indonesia masih merupakan kontributor terbesar dibandingkan wilayah perkotaan. Tingkat kemiskinan perdesaan (P_0) atau *Head Count Index* sembilan tahun terakhir masih berada diatas angka 12 persen dengan nilai rata-rata 13,17 persen. Sedangkan P_0 perkotaan berada dibawah angka 8,3 persen dengan nilai rata-rata 7,5 persen (Gambar 1.1.). Buruknya kondisi kemiskinan perdesaan juga tergambarkan dari perbedaan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) atau *Poverty Gap Index* dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) atau *Poverty Severity Index*. Berdasarkan data kemiskinan nasional diketahui nilai P_1 dan P_2 perdesaan tahun 2023 masing-masing sebesar 2.04 dan 0.51, nilai ini hanya sedikit lebih rendah dari nilai P_1 (2.08) perkotaan pada tahun 2011 dan P_2 (0.52) perkotaan pada tahun 2009. Kondisi ini menggambarkan diparitas yang besar antara perdesaan dan perkotaan, dan menyiratkan jika upaya pengentasan kemiskinan relatif sama maka perdesaan membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk berada pada kondisi perkotaan di tahun 2023 (Lampiran 1.).



Gambar 1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2015-2023 (Persen)

Sumber : BPS, 2024

Di sisi lain, kenyataan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan menunjukkan variasi antar wilayah meskipun berada di bawah kerangka kebijakan pengentasan kemiskinan yang relatif seragam, ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lokal memainkan peran

yang signifikan. Karakteristik lokal seperti sumberdaya manusia, kelembagaan dan kualitas infrastruktur, serta struktur ekonomi perdesaan yang mendominasi aktivitas penciptaan lapangan kerja dan pendapatan yang terbukti turut membentuk arah dan hasil dari proses pengentasan kemiskinan perdesaan.

Fenomena ini tentunya menarik dan penting untuk dikaji karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemiskinan perdesaan dibandingkan beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh kebijakan makroekonomi, karakteristik lokal dan struktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara parsial, seperti analisis yang hanya menyoroti pengaruh kebijakan makroekonomi terhadap kemiskinan perdesaan (Gundersen and Ziliak, 2004; Fisz dan Shapiro, 2011; Maharajabdinul et al., 2015; Sasana, 2015; Lustig, 2018). Analisis yang hanya fokus pada pengaruh karakteristik lokal terhadap kemiskinan perdesaan (Blank, 2005; Psacharopoulos & Patrinos, 2018; Spring, 2015; Miranti, 2017; Wang et al., 2021; Liu et al., 2023). Ataupun analisa pengaruh stuktur ekonomi perdesaan terhadap kemiskinan perdesaan (Gao, 2021; Kamaludin A.S, 2023; Suparman et al., 2024; Saputra dan Ginting, 2024; Nahor dan Anggraini, 2024). Penelitian ini merupakan sintesis dari berbagai studi terdahulu yang telah dikemukakan diatas dengan mengintegrasikan isu-isu terbaru yang relevan sebagai respons terhadap agenda pembangunan yang semakin menekankan pada desentralisasi dan inklusi sosial. Kebijakan makroekonomi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Dana Desa sebagai bentuk intervensi fiskal langsung, serta inflasi sebagai variabel ekonomi yang mencerminkan hasil dari intervensi kebijakan fiskal maupun moneter. Adapun Karakteristik lokal yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, kelembagaan sosial ekonomi dan kondisi infrastuktur dan layanan publik di perdesaan yang terkait erat dengan status desa. Keunikan studi ini juga terletak pada pendekatannya yang tidak hanya melihat pengaruh kebijakan makroekonomi dan karakteristik lokal terhadap kemiskinan perdesaan secara langsung, tetapi juga secara

tidak langsung melalui struktur ekonomi dominan di pedesaan Indonesia yaitu sektor pertanian dan industri mikro kecil.

Mengapa ketiga kelompok faktor ini dinilai memiliki pengaruh kuat terhadap kemiskinan pedesaan, berdasarkan penelusuran teori dan empiris diketahui bahwa kebijakan makroekonomi transfer fiskal dalam hal ini Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah yang dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara desa dan kota, dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa. Kebijakan Dana Desa diluncurkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari bentuk *Community Driven Development* (CDD) dan memberikan efek signifikan dalam menurunkan kemiskinan pedesaan (Agusta dan Khoirunurrofik, 2024; Zuliansyah, M. I., & Wahyudi, H., 2024; Sigit dan Kosasih, 2020). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi yang lebih luas, salah satunya adalah inflasi. Ketika pemerintah mengambil keputusan ekonomi yang memicu kenaikan harga barang pokok seperti penyesuaian harga energi bisa saja menggerus manfaat langsung dari transfer fiskal seperti Dana Desa. Inflasi merupakan salah satu petunjuk kondisi makro-ekonomi suatu wilayah (Hasan, 2004), Pengaruh inflasi daerah terhadap inflasi nasional sangat besar begitu juga pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan (Prastowo, 2010; Rehman, 2022; Akhmad et al. 2023; Arintoko et al. 2023).

Karakteristik lokal merupakan manifestasi dari kondisi sumber daya manusia, kelembagaan sosial ekonomi, serta infrastruktur dan layanan publik di setiap wilayah. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama keberhasilan suatu program, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan (Dao, 2008; Fan, 2009; Kosim, 2010). Kementerian Keuangan (2018) juga mengemukakan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif. Selaras dengan hal tersebut, Olopade et al. (2019) menemukan bahwa tenaga kerja yang lebih terampil dan sehat memiliki

produktivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya akses terhadap modal untuk berwirausaha di wilayah perdesaan, baik pada sektor pertanian maupun industri mikro kecil, telah menjadi landasan bagi intervensi pemerintah dalam pengembangan kelembagaan sosial ekonomi, yang diwujudkan melalui pendirian dan pengembangan koperasi sejak lebih dari 70 tahun yang lalu.

Koperasi awalnya didirikan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan akibat jerat utang berbunga tinggi pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, koperasi berperan penting dalam pembangunan nasional dan terus berlanjut hingga sekarang (Sitepu dan Hasyim 2018). Koperasi telah lama menyatu dengan masyarakat dan berperan penting dalam struktur sosial-ekonomi, khususnya di negara berkembang. (Ishak et al. 2020). Di Eropa, koperasi merupakan aktor utama sektor pertanian, berkontribusi 40 – 60 persen dalam perdagangan pertanian serta berperan sebagai katalis dalam pembangunan perdesaan (Ajates, 2020; Shpykuliak O., 2020). Menurut Zhang et al. (2023) koperasi merupakan intervensi yang efektif dalam pembangunan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan miskin dan tertinggal.

Wilayah perdesaan dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Keterisolasian geografis memperparah kondisi tersebut dengan menghambat akses terhadap pasar, layanan publik dan program pembangunan (Hanim, Mulyana, and Subagio 2023). Dalam konteks Indonesia, wilayah-wilayah seperti ini sering dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal dan tertinggal, di mana mayoritas penduduk masih menggantungkan hidup pada pertanian subsisten dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak menentu (Hanim, Mulyana, and Subagio 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan konektivitas,

efisiensi produksi, dan akses terhadap layanan publik (Qin, Wu, and Shan 2022; Calderón and Servén 2014). Ketika infrastruktur dan layanan publik membaik, mobilitas sosial menjadi lebih terbuka, dan status desa pun dapat mengalami transformasi bertahap dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, berkembang, hingga mandiri. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perdesaan yang efektif memerlukan pendekatan terpadu menggabungkan pembangunan fisik, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan basis ekonomi lokal (Estache and Wodon 2014; Khandker, Koolwal, and Samad 2009).

Lebih lanjut struktur ekonomi penting dalam analisis kemiskinan perdesaan karena mencerminkan pola distribusi aktivitas ekonomi, jenis mata pencaharian, dan kapasitas produksi yang tersedia di suatu wilayah yang pada gilirannya memengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan hidup (Echeverri et al., 2021; Radosavljevic et al., 2020; Che Mata et. al, 2020; Wu, J.X., & He, L.Y., 2016; World Bank, 2008). Di kawasan perdesaan, struktur ekonomi yang dominan umumnya berbasis pada sektor-sektor primer seperti pertanian dan industri, dimana peningkatan produktivitas pertanian dan industri mikro kecil di perdesaan memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Quang Dao 2004; Tyler, El-Ghonemy, and Couvreur, 1993; Todaro and Smith, 2015; Kinda dan Loening, 2010).

Dalam konteks kompleksitas persoalan kemiskinan perdesaan, analisis terhadap pengaruh kebijakan makroekonomi dan karakteristik lokal menjadi sangat krusial. Hal ini tidak hanya penting untuk memahami dampak langsungnya terhadap tingkat kemiskinan, namun juga menelaah mekanisme tidak langsung yang bekerja melalui pertumbuhan sektor pertanian dan industri mikro kecil sebagai penggerak utama ekonomi perdesaan. Kebijakan makroekonomi memiliki potensi besar dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal apabila disusun dan diimplementasikan secara selaras dengan karakteristik lokal. Dengan memahami keterkaitan struktural dan

dinamika antar faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan perdesaan yang lebih kontekstual, terarah dan berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Interaksi kebijakan makro-ekonomi dan karakteristik lokal dapat memberikan berbagai kemungkinan dalam upaya pengentasan kemiskinan perdesaan di Indonesia. Bagaimana pengaruh dan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui struktur ekonomi dominan di perdesaan, tentu menjadi suatu hal yang menarik dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil ?
3. Apakah mutu sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil ?
4. Apakah kelembagaan sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil ?
5. Apakah status desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil
2. Menganalisis pengaruh mutusumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil .
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil .
4. Menganalisis pengaruh kelembagaan sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil .
5. Menganalisis pengaruh status desa terhadap tingkat kemiskinan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan industri mikro-kecil ?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya keilmuan ekonomi studi pembangunan khususnya bagaimana penanganan kemiskinan dan pembangunan perdesaan. Analisa determinan dalam kajian pengaruh kebijakan makro ekonomi dan karakteristik lokal terhadap kemiskinan perdesaan dapat memberikan gambaran bagaimana gerak kemiskinan perdesaan di Indonesia. Adapun Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai: 1) bahan informasi dan referensi bagi peneliti dan akademisi untuk penelitian lebih lanjut ataupun berbeda

dengan topik yang sama atau terkait, dan 2) bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait dengan pemerintahan pusat maupun lokal memutuskan kebijakan publik maupun penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini spesifik mengkaji pengaruh kebijakan makro dan karakteristik lokal terhadap kemiskinan di perdesaan pada rentang waktu 2015 – 2023 (sembilan tahun) pada 33 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Pengecualian pada Provinsi DKI Jakarta, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya, karena tidak memiliki data yang dibutuhkan. Variabel yang mewakili kebijakan dan kondisi makroekonomi adalah Dana Desa dan inflasi, sedangkan variabel yang mewakili karakteristik lokal yaitu sumber daya manusia, kelembagaan sosial ekonomi (Koperasi) dan status desa pada konsteks struktur perekonomian perdesaan. Kajian penelitian mengikuti telaah teori penyebab kemiskinan Brady (2019) dimana teori kemiskinan dikategorikan dalam tiga kelompok teori yang lebih luas yaitu: teori perilaku, struktural dan politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan yang berubah seiring waktu dan ruang mencerminkan pergeseran pemikiran ke isu yang lebih luas, walaupun demikian masih tetap terkait erat dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa kemiskinan sepenuhnya melekat dan dikendalikan oleh individu, kemampuan dan kebebasan individu berbisnis akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan karena meningkatnya kekayaan nasional (Himmelfarb dalam Varenne and Scroggins, 2015). Sebaliknya Keynes (1936) berpendapat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui peningkatan belanja publik dan investasi, dapat meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja yang mengurangi kemiskinan (Stiglitz, J. E. ,2012 dan Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2020).

Teori neoklasik lebih luas kajiannya dan mengakui alasan kemiskinan di luar kendali individu, seperti kurangnya kepemilikan aset sosial dan pribadi, kegagalan pasar, hambatan pendidikan, status imigran dan perkawinan, kesehatan yang buruk dan usia lanjut, dimana batasan campur tangan pemerintah hanya sebatas memperbaiki distorsi dan bukan menggantikan mekanisme pasar. Berbeda dengan teori neokeynes yang menyatakan harus ada campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar karena ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan (permintaan dan penawaran) dan kesenjangan. Menurut Baratz et al (1972) kesenjangan pendapatan yang melebar menimbulkan ketimpangan ekonomi yang parah atau kemiskinan, dimana orang miskin merupakan kelompok yang bagian dari total pendapatan dan kekayaannya jauh lebih

kecil daripada persentase mereka dalam total populasi. Pemerintah memainkan peran krusial dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Musgrave (1989) mengidentifikasi tiga fungsi utama pemerintah dalam ekonomi yaitu: pertama fungsi alokasi, pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta, seperti keamanan, infrastruktur, dan pendidikan. Kedua fungsi distribusi, melalui kebijakan perpajakan dan program kesejahteraan sosial, pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Ketiga stabilisasi, dengan kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di negara berkembang literatur tentang kemiskinan seringkali mengambil definisi 'kesejahteraan ekonomi' yang cukup sempit yaitu merujuk pada konsumsi barang dan jasa seseorang pada tingkat minimum (kebutuhan konsumsi dasar). Sulitnya negara berkembang keluar dari kemiskinan digambarkan Nurske (1953) dalam (Hashim et al, 2016) sebagai fenomena lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle of poverty*. Rendahnya pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat miskin untuk menabung, berinvestasi dan memiliki modal, yang akhirnya berdampak pada rendahnya produktifitas, yang menyebabkan rendahnya permintaan tenaga kerja dan kembali menghasilkan pendapatan rendah. Lingkaran kemiskinan dapat dijelaskan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, kemiskinan seringkali disebabkan oleh kurangnya permintaan terhadap tenaga kerja dan produk yang dihasilkan masyarakat miskin. Dari sisi penawaran, kemiskinan dipengaruhi struktur dan efisiensi produksi seperti keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan (Akanbi, O., & Toit, C., 2011; Amsden, A., 2010; Tao, Z., 2017).

Teori *Circular and Cumulative Causation* (CCC) yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal (1957) juga memberikan landasan teoretis penting dalam memahami dinamika kemiskinan perdesaan yang bersifat sistemik dan saling memperkuat. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak dipandang semata-mata sebagai akibat dari kekurangan pendapatan, tetapi sebagai hasil dari proses interaktif yang melibatkan berbagai faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan sosial ekonomi, serta terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan layanan publik. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dan memperkuat secara kumulatif dalam siklus yang sulit diputus, di mana ketertinggalan dalam satu aspek akan memperburuk kondisi aspek lainnya.

Lebih lanjut Nicholas Kaldor (1970) mengembangkan konsep CCC dalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah, dan menunjukkan bahwa pertumbuhan cenderung terpusat pada wilayah-wilayah yang telah memiliki keunggulan awal (seperti infrastruktur, pasar, dan tenaga kerja terampil). Proses ini menciptakan cumulative advantage, di mana wilayah maju tumbuh semakin pesat, sementara wilayah tertinggal seperti perdesaan mengalami stagnasi. Dalam konteks ini, pertumbuhan sektor-sektor produktif seperti pertanian dan industri mikro kecil di perdesaan hanya akan terjadi bila didukung oleh kebijakan makroekonomi yang sensitif terhadap karakteristik lokal.

Adapun sulitnya masyarakat miskin keluar dari kemiskinan digambarkan oleh Chambers (1987) sebagai perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) yang terdiri dari lima unsur yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri (*poverty*), 2) kelemahan fisik (*physical weakness*), 3) kerentanan (*vulnerability*), 4) ketidakberdayaan (*powerless*) dan 5) keterasingan (*isolation*) yang saling bertautan seperti jaring menciptakan perangkap kemiskinan yang kompleks dan saling memperkuat, membuat upaya untuk keluar dari kemiskinan menjadi sangat sulit.

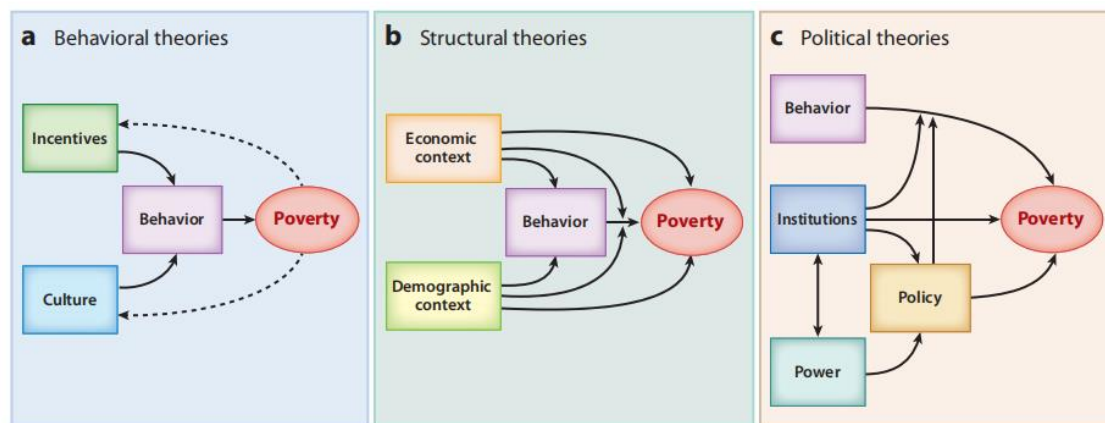
Menurut Wagle (2002) kondisi keterbatasan sumber daya ekonomi dan nonekonomi, kapasitas individu dan tatanan sosial yang secara simultan berinteraksi

menciptakan ketidaksejahteraan atau kemiskinan. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Hartwell dalam Ravallion (1993) dan Lipton (1993) 30 tahun sebelumnya bahwa; penguasaan yang tidak memadai atas komoditas adalah dimensi kemiskinan dan merupakan salah satu motif kuat dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan diberbagai negara di dunia.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan perlu diketahui penyebabnya agar dapat diterapkan strategi penanggulangan yang tepat, berdasarkan kajian teoritis dan empirik selama beberapa dekade Bradshaw menyimpulkan ada 5 penyebab kemiskinan yaitu: 1) kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan individu (*poverty Caused by Individual Deficiencies*), 2) kemiskinan yang disebabkan oleh sistem kepercayaan budaya yang mendukung sub-budaya kemiskinan (*poverty caused by cultural belief systems that support subcultures of poverty*), 3) kemiskinan yang disebabkan oleh distorsi atau diskriminasi ekonomi, politik dan sosial (*poverty caused by economic, political, and social distortions or discrimination*), 4) kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan geografis (*poverty caused by geographical disparities*), dan 5) kemiskinan yang disebabkan oleh ketergantungan yang bersifat kumulatif dan siklikal (*poverty caused by cumulative and cyclical interdependencies*). Sifat dan penyebab multidimensi kemiskinan menghasilkan penjelasan yang beragam tentang teori kemiskinan di berbagai wilayah dan fenomena; mulai dari kondisi kekurangan, sosial eksklusi hingga ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya (Fei, 2019).

Kajian teori kemiskinan terbaru dihadirkan Brady (2019) yang mengkategorikan teori kemiskinan dalam tiga kelompok teori yang lebih luas yaitu: teori perilaku, struktural dan politik (Gambar 2.1.). Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks dan multifaktor, sehingga pemahaman tentang penyebabnya membutuhkan pendekatan yang integratif antara ketiga teori tersebut. Teori prilaku (*Behavioral Theories*) fokus pada perilaku (pilihan dan tindakan individu) sebagai penyebab utama kemiskinan. Dalam perspektif ini, keputusan ekonomi yang buruk, kurangnya motivasi kerja, dan

budaya ketergantungan dianggap memperkuat kondisi kemiskinan. Teori ini menyoroti bagaimana insentif, budaya, dan risiko sosial mempengaruhi keputusan individu dan berkontribusi pada kondisi kemiskinan. Kemiskinan secara timbal balik mempengaruhi perilaku untuk mereproduksi kemiskinan secara intra dan antargenerasi secara berulang, sebagaimana yang digambarkan teori jebakan kemiskinan: merupakan argumen dari fenomena kemiskinan menciptakan insentif buruk siklikal.



Gambar 2.1. Model Konseptual Hubungan Kausalitas Teori Perilaku, Struktur dan Politik Dalam Kemiskinan.
Sumber : Brady (2019)

Teori-teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan muncul sebagai hasil dari struktur sosial dan ekonomi, termasuk pasar tenaga kerja dan kondisi demografis. Teori ini juga melihat bagaimana konteks ekonomi dan demografi menentukan perilaku dan peluang ekonomi individu, yang mempengaruhi kemiskinan. Ketimpangan struktur sosial dan ekonomi menciptakan kondisi yang membatasi peluang bagi individu atau kelompok tertentu, mempengaruhi perilaku mereka.

Teori politik memandang bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kebijakan publik. Dalam pandangan ini, kemiskinan muncul karena: Kebijakan yang tidak pro-rakyat, seperti pengurangan subsidi atau layanan sosial. Distribusi kekuasaan yang tidak merata, di mana kelompok yang kurang beruntung tidak memiliki akses untuk memengaruhi kebijakan. Teori politik mengidentifikasi peran

kekuasaan dan institusi dalam mempengaruhi kebijakan publik dan distribusi sumber daya. Kekuasaan politik dan kebijakan pemerintah dianggap memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara perilaku, kesempatan, dan kemiskinan, serta dalam menciptakan atau memitigasi kemiskinan. Secara keseluruhan, Brady (2019) menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami kemiskinan, dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor-faktor perilaku, struktural, dan politik, bukan hanya melihat satu perspektif secara terpisah.

2.1.2. Ukuran Kemiskinan

Sebagaimana konsep kemiskinan, ukuran kemiskinan juga menjadi perdebatan karena ruang lingkup kemiskinan yang melebar. Ada empat pendekatan dalam pengukuran kemiskinan: 1) pendekatan moneter; kemiskinan diukur berdasarkan pendapatan atau konsumsi individu atau rumah tangga, 2) pendekatan kapabilitas; pendekatan ini menilai kemiskinan berdasarkan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang berharga, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial, 3) pendekatan eksklusi sosial; melihat kemiskinan sebagai hasil dari keterasingan individu atau kelompok dari aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat, sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka, dan 4) pendekatan partisipatif; pendekatan ini menekankan peran komunitas miskin dalam mendefinisikan sendiri kemiskinan mereka, melalui partisipasi dalam survei atau diskusi tentang kebutuhan dan hambatan yang mereka alami

Pada dasarnya, ukuran kemiskinan berusaha untuk mengidentifikasi siapa yang miskin dan seberapa parah kondisi kemiskinan tersebut. Konsep ini telah mengalami perkembangan mulai dari ukuran berbasis pendapatan Rowntree, B.S., (1901) dan Kuznet, S., (1955) hingga konsep multidimensional Amartya Sen (1999) dan Alkire dan Foster (2011). Ukuran kesejahteraan ekonomi yang paling banyak digunakan adalah pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan

adalah salah satu pendekatan konvensional dan paling umum digunakan untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori miskin, ukuran ini berfokus pada pendapatan rumah tangga atau individu dan membandingkannya dengan garis kemiskinan tertentu, yaitu ambang batas pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pakaian. Jika pendapatan seseorang atau rumah tangga berada di bawah garis ini, mereka diklasifikasikan sebagai miskin.

Bank Dunia menggunakan nilai \$1,90 per hari sebagai Garis kemiskinan internasional berdasarkan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Standar ini berguna untuk membandingkan kemiskinan antar negara, dan banyak negara menggunakan konsep ukuran kemiskinan ini, karena variabilitas pendapatan (dapat diprediksi) dari waktu ke waktu (Ravallion, 2010), dan nilai garis kemiskinan dapat disesuaikan dengan biaya hidup dan standar lokal di wilayah masing-masing. Meskipun umum digunakan, ukuran kemiskinan berbasis pendapatan memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 1) pendapatan fluktuatif: di sektor informal, pendapatan sering berfluktuasi dan tidak konsisten, membuat pengukuran kurang akurat, 2) kesulitan pelaporan: banyak rumah tangga miskin tidak melaporkan semua sumber pendapatan mereka, seperti bantuan sosial atau transfer dari keluarga, 3) Tidak mencakup akses ke layanan: pendapatan tidak selalu mencerminkan akses rumah tangga ke layanan kesehatan, pendidikan, atau air bersih. Oleh karena itu Deaton, A., (1997) dan Bruce D. Meyer dan James X. Sullivan (2003) memperluas konsep tersebut pada ukuran berbasis konsumsi yang dinilai lebih akurat daripada pendapatan, karena konsumsi mencerminkan pola pengeluaran aktual dan pemanfaatan bantuan atau aset rumah tangga.

Dalam kebijakan publik ukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan dan konsumsi sering digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan menentukan eligibility program bantuan sosial. Di Indonesia, misalnya, data pendapatan dan

konsumsi dari Susenas digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan nasional dan regional yang menjadi dasar untuk merancang program intervensi sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Ini senada dengan yang dikemukakan oleh Laderchi (2003) bahwa pendekatan moneter lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan karena dapat mendekati aspek-aspek kemiskinan atau kesejahteraan yang sulit diukur dalam satuan yang sama, acuan ini dapat meredakan ketegangan kompleksitas teoritis pengukuran kemiskinan.

Konsep pengukuran multidimensional dipelopori oleh Amartya Sen (1976) dengan memperkenalkan Sen Poverty Indeks (P_S) dimana pengukuran kemiskinan mempertimbangkan 2 aspek utama yaitu: 1) prevalensi kemiskinan: berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 2) kedalaman dan ketimpangan: seberapa jauh pendapatan individu di bawah garis kemiskinan dan seberapa tidak meratanya distribusi di antara orang miskin, dengan rumusan persamaan sebagai berikut:

$$P_S = H \times [I + (1 - I) \times G]$$

Dimana: H (*Headcount Ratio*) mengukur berapa banyak orang yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Ini adalah indikator umum dalam pengukuran kemiskinan, tetapi Sen menganggap bahwa angka ini tidak cukup untuk menangkap kedalaman kemiskinan.

I (*Income Gap*): mengukur rata-rata jarak antara pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan, memberikan informasi tentang seberapa parah kemiskinan tersebut.

G (*Gini Coefficient*): memperhitungkan ketimpangan di antara orang miskin, karena ketimpangan yang tinggi menunjukkan bahwa beberapa orang miskin mengalami kemiskinan yang jauh lebih parah daripada yang lain.

Konsep multidimensional Sen. A., (1999) yang sebelumnya bersifat filosofis oleh Alkire dan Foster (2011) diubah menjadi alat yang praktis dan terukur yaitu *Multidimensional Poverty Index* (MPI). MPI mengukur kemiskinan dengan menggabungkan tiga dimensi pokok yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator, dan kekurangan pada sejumlah indikator menunjukkan bahwa seseorang atau satu rumah tangga hidup dalam kemiskinan multidimensional (Tabel 2.1.).

Tabel 2.1. Multidimensional Poverty Index (MPI).

No.	Dimensi	Indikator
1.	Kesehatan	1. Nutrisi : apakah ada malnutrisi dalam keluarga
		2. Angka kematian anak:
2.	Pendidikan	3. Lama sekolah
		4. Angka Anak tidak bersekolah
3.	Standar Hidup	5. Bahan bakar memasak
		6. Akses ke listrik
		7. Akses ke air bersih
		8. Sanitasi
		9. Kepemilikan aset
		9. Kualitas perumahan

Sumber: UNDP (2010); Alkire, S., & Foster, J. (2011).

MPI adalah produk dari insiden dan intensitas kemiskinan. Ini memberikan gambaran lengkap tidak hanya berapa banyak orang yang miskin, tetapi juga seberapa parah kemiskinan yang mereka alami. MPI digunakan untuk menargetkan intervensi kebijakan dengan lebih baik, karena mengidentifikasi secara spesifik area di mana orang miskin mengalami kekurangan. MPI membantu pemerintah dan lembaga internasional memantau tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga resmi yang menyediakan data kemiskinan nasional dan daerah. BPS secara rutin melakukan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga. BPS menentukan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum kalori (2.100 kkal per hari) dan pengeluaran non-makanan. Metode Penghitungan Kemiskinan BPS (Lampiran 2.) menggunakan beberapa indikator untuk menggambarkan profil kemiskinan: 1) indeks kemiskinan absolut (P_0): mengukur proporsi populasi yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan,

2) indeks kedalaman kemiskinan (P_1): mengukur rata-rata selisih antara pengeluaran masyarakat miskin dengan garis kemiskinan, memberikan informasi seberapa jauh rumah tangga miskin dari garis tersebut, dan 3) indeks keparahan kemiskinan (P_2): memperhitungkan ketimpangan di antara masyarakat miskin, semakin tinggi P_2 , semakin besar ketimpangan di antara orang miskin. Penghitungan garis kemiskinan berbeda untuk setiap daerah, disesuaikan dengan biaya hidup lokal. Menurut Belhadji (2012) jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan adalah indeks yang paling umum digunakan dalam berbagai literatur pengukuran kemiskinan. Ketepatan ukuran menjadi penting karena terkait erat dengan upaya pembuatan kebijakan anti-kemiskinan yang efektif.

Berbeda dengan BPS, BKKBN tidak secara langsung melakukan penghitungan kemiskinan tetapi berperan dalam pengumpulan data terkait kesejahteraan keluarga dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. BKKBN fokus pada kesejahteraan keluarga dan pengukuran tingkat ketahanan keluarga, yang berkaitan erat dengan aspek multidimensional dari kemiskinan. BKKBN menentukan kemiskinan dari segi kesejahteraan dimana keluarga diklasifikasikan dalam 5 kategori yaitu Keluarga Pra Sejahtera (miskin), Keluarga Sejahtera 1 (rentan miskin), Keluarga Sejahtera 2, Keluarga Sejahtera 3, dan Keluarga Sejahtera 3 plus (Lampiran 3.)

Perkembangan ukuran kemiskinan telah bergeser dari pendekatan moneter (kemiskinan absolut) ke pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kemiskinan bukan hanya soal minimnya pendapatan, tetapi juga minimnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional, pemerintah dan lembaga internasional dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan (Alkire, S., & Foster, J., 2011; Agussalim, 2011; Brady, 2019).

2.1.3. Kebijakan Makroekonomi

Kebijakan makroekonomi mencakup berbagai strategi pemerintah untuk mengendalikan variabel-variabel ekonomi utama seperti: inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan ini melibatkan dua instrumen utama yaitu: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dimana keduanya berperan dalam mengatur tingkat konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Kebijakan makroekonomi juga mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan, terutama dalam hal bagaimana distribusi pendapatan dan stabilitas harga mempengaruhi masyarakat miskin (Suparmono, 2018; Mankiw 2018; Lipsey R.G., et al., 2008)

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sering dianggap sebagai kunci pengentasan kemiskinan. Namun, penting untuk memahami bahwa distribusi manfaat yang merata dari pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh. Meskipun peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, namun manfaatnya tidak selalu merata. Dalam banyak kasus, ketimpangan justru meningkat karena kelompok berpenghasilan tinggi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, sebaliknya kelompok berpenghasilan rendah cenderung mendapatkan porsi terkecil (Galor, O., & Zeira, J., 1993; Perotti, R., 1996; Mody & Pattillo, 2006; Brückner, M., & Lederman, D., 2015).

Stabilitas ekonomi penting dalam mengurangi kemiskinan. Inflasi yang rendah dapat membantu masyarakat miskin menjaga daya beli, terutama karena pengeluaran rumah tangga miskin terfokus pada kebutuhan pokok. Di sisi lain kebijakan stabilisasi sering kali memerlukan pengetatan moneter atau fiskal, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif pada pendapatan masyarakat miskin dalam jangka pendek (Ferreira, F. H. G., et al., 1999; Easterly, W., & Fischer, S., 2001; Agénor, P.-R., 2002; Azis, 2015; Cornia, 2020), seperti sebagai berikut:

1. Penurunan Permintaan Agregat

Pengetatan moneter seperti kenaikan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar akan menurunkan konsumsi dan investasi (permintaan agregat). Pada kondisi ini masyarakat dan pelaku usaha cenderung menunda pembelian dan investasi, dampaknya pertumbuhan ekonomi menurun yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran (masyarakat miskin rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan).

2. Pemotongan Belanja Publik

Pengetatan fiskal seperti pengurangan belanja pemerintah, sering kali terfokus pada sektor kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat miskin. Ketika belanja publik berkurang, maka akses terhadap layanan dasar menurun, ini akan memperburuk kondisi hidup masyarakat miskin yang bergantung pada layanan tersebut.

3. Pengurangan Subsidi dan Dampaknya terhadap Harga

Pemangkasan subsidi, terutama pada kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan pangan. Langkah ini meningkatkan harga barang-barang esensial, yang paling membebani masyarakat miskin karena sebagian besar pengeluaran mereka terfokus pada konsumsi barang-barang tersebut. Kenaikan harga menyebabkan penurunan daya beli, yang memperburuk kondisi kemiskinan.

4. Keterbatasan Akses Kredit bagi Usaha Kecil

Kenaikan suku bunga sebagai bagian dari pengetatan moneter memperburuk akses pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga miskin. Dengan terbatasnya akses modal, usaha mikro mengalami kesulitan berkembang dan mempertahankan operasional, sehingga berisiko menurunkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor ini (Mallick, 2008).

Penurunan aktivitas ekonomi akibat kebijakan pengetatan sering kali memicu peningkatan pengangguran dalam jangka pendek, ini karena masyarakat miskin umumnya bekerja di sektor-sektor informal, mereka lebih rentan terdampak oleh pengurangan lapangan pekerjaan. Penurunan pendapatan rumah tangga miskin dapat memperburuk kemiskinan dalam waktu singkat sebelum stabilitas ekonomi tercapai (Easterly, W., et al., 2001 dan Azis, 2015). Meskipun pengetatan moneter dan fiskal bertujuan untuk stabilisasi jangka panjang, dampak positifnya sering kali baru dirasakan setelah periode waktu tertentu. Selama fase transisi ini, masyarakat miskin menghadapi kesulitan karena pendapatan mereka tertekan dan kebutuhan dasar menjadi lebih mahal, dengan kata lain manfaat stabilisasi baru terasa setelah fase penurunan ekonomi, membuat kelompok rentan lebih berisiko mengalami kerugian.

Kebijakan stabilisasi menghadirkan dilema bagi pemerintah karena meskipun inflasi dapat dikendalikan, pertumbuhan ekonomi harus dikorbankan sementara. Dalam banyak kasus, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, kebijakan ini memperburuk ketimpangan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga efektivitasnya dalam menciptakan kestabilan ekonomi secara keseluruhan menjadi terbatas (Essama-Nssah, 2005). Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pengetatan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, penerapannya harus disertai dengan kebijakan sosial dan jaring pengaman yang memadai untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat miskin.

Kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja publik dan transfer langsung juga mempengaruhi kemiskinan. Belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Studi menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan, program pembangunan infrastruktur dan subsidi pemerintah memiliki efek signifikan dalam mengurangi kemiskinan (Agussalim et al. 2024; Fattah et al. 2022; Cornia, 2020).

Selain itu, ketersediaan kredit dan kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong sektor informal dan UMKM, terutama di daerah pedesaan, yang merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat miskin. Namun, dampaknya bisa berbeda-beda tergantung pada struktur ekonomi setiap negara. Di Indonesia, misalnya, peningkatan kredit untuk sektor pertanian dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas, tetapi efeknya terbatas jika harga hasil pertanian menurun (Mallick, 2008).

Dalam konteks global, kebijakan makroekonomi juga menghadapi tantangan dalam menangani guncangan eksternal, seperti krisis keuangan atau fluktuasi harga komoditas. Guncangan semacam ini dapat memperburuk kemiskinan jika pemerintah tidak memiliki kebijakan mitigasi yang memadai. Model simulasi menunjukkan bahwa respons kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat miskin (Essama-Nssah, 2005). Secara keseluruhan, kebijakan makroekonomi yang efektif memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan, serta strategi yang memperhatikan dampak jangka panjang dan jangka pendek pada masyarakat miskin. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4. Teori Inflasi

Teori inflasi merupakan salah satu topik penting dalam ekonomi makro karena mencerminkan perubahan harga secara keseluruhan dan dampaknya terhadap ekonomi. Inflasi terjadi ketika tingkat harga barang dan jasa secara umum meningkat dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks teori ekonomi, inflasi dapat dijelaskan melalui dua perspektif utama: teori moneter dan teori struktural.

Teori moneter menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar yang tidak sebanding dengan pertumbuhan output ekonomi (Friedman,

1983 dan Irving Fishers, 1933. Dalam teori moneter klasik, peningkatan uang beredar menciptakan permintaan berlebih, yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa (Mankiw N.G., 2018; Sukirno S., 2006; Boediono, 2014). Teori ini menekankan bahwa kontrol terhadap inflasi membutuhkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan jumlah uang dalam perekonomian. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan kontrol uang beredar yang lemah cenderung mengalami inflasi tinggi, seperti diungkapkan dalam pengalaman beberapa negara berkembang seperti Vietnam dan China (Van, 2019).

Sebaliknya teori struktural menjelaskan inflasi sebagai akibat dari ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian, seperti inefisiensi pasar, keterbatasan infrastruktur, dan masalah distribusi (suparmoko M., 1997; Samuelson, P.A. dan Nordhaus, W.D., 1997; Sukirno, S., 2016; Rantebua, A., 2020). Inflasi juga dapat memengaruhi performa sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi berdampak negatif pada pengembangan sektor perbankan dan pasar ekuitas, terutama ketika tingkat inflasi melebihi 15 persen. Hal ini memperburuk alokasi sumber daya di sektor keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Boyd et al., 2001). Studi Camera dan Chien (2013) menemukan bahwa inflasi dapat mengurangi ketimpangan kekayaan namun meningkatkan ketimpangan konsumsi. Ini terjadi karena distribusi kekayaan dan konsumsi dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan harga dalam jangka panjang.

Teori inflasi modern juga menyoroti adanya hubungan non-linear antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. López-Villavicencio dan Mignon (2011) menyatakan bahwa inflasi yang rendah hingga sedang dapat mendukung pertumbuhan, tetapi inflasi tinggi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga tingkat inflasi pada batas optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain dampak makroekonomi, inflasi juga mempengaruhi perilaku pasar dan keputusan investasi. Lintner (1975)

menemukan bahwa inflasi mengubah model pengembalian investasi dan ekuilibrium pasar modal, yang memerlukan penyesuaian dalam strategi investasi dan manajemen risiko di sektor keuangan. Inflasi tidak hanya berhubungan dengan variabel moneter, tetapi juga dengan perkembangan sosial dan kebijakan publik. Studi oleh Carvalho et al. (2018) menemukan bahwa negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki inflasi lebih rendah, karena mereka memiliki infrastruktur ekonomi yang lebih kuat dan kebijakan moneter yang lebih baik.

Dalam jangka pendek, kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi bisa menyebabkan pengangguran karena perusahaan menyesuaikan produksi dan investasi. Namun, dalam jangka panjang, kontrol inflasi yang efektif dapat mendorong kestabilan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih merata (Faria & Carneiro, 2001; Mahadika H. dan Wibowo W., 2021). Secara keseluruhan, teori inflasi mencakup berbagai dimensi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan pengambilan keputusan keuangan. Inflasi yang terkendali merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli dan memperburuk kemiskinan, sehingga kebijakan moneter ekspansif yang menstabilkan harga dan meningkatkan pendapatan sangat dibutuhkan. Dampak kebijakan moneter ini bervariasi tergantung pada struktur ekonomi dan elastisitas upah tiap daerah (Murjani, 2019). Kebijakan fiskal berupa bantuan sosial berperan sentral dalam menjaga konsumsi masyarakat miskin, meskipun efektivitasnya sering terkendala ketepatan penargetan dan birokrasi di tingkat lokal (Sumarsono et al., 2022).

Lebih jauh, efektivitas program sosial seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Dana Desa sangat bergantung pada kondisi makroekonomi yang stabil. Tanpa dukungan kebijakan makroekonomi yang memadai, dampak program-program ini cenderung hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan (Ahdiyana et al., 2020). Dengan demikian, koordinasi antara kebijakan makroekonomi dan program sosial sangat penting agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan

efektif. Kebijakan yang menstabilkan harga, menurunkan pengangguran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus selaras dengan program sosial yang tepat sasaran agar kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan.

2.1.5. Teori Sumber Daya Manusia

Teori sumber daya manusia atau *human capital* berakar dari asumsi bahwa peningkatan kualitas individu melalui pendidikan, keterampilan dan kesehatan merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan kesejahteraan ekonomi. Sebagai pelopor teori Schultz (1961) dan Becker (1964) menunjukkan bahwa akumulasi pengetahuan dan keterampilan memiliki dampak langsung terhadap pendapatan individu dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks kemiskinan, pendekatan ini menekankan bahwa investasi pada modal manusia merupakan strategi jangka panjang yang efektif untuk keluar dari perangkap kemiskinan struktural.

Pendidikan formal merupakan komponen utama dalam investasi modal manusia. Sejak awal, Mincer (1958) dan Schultz (1961) telah mengemukakan bahwa pendidikan memberikan *return on education* yang positif, di mana individu yang memperoleh pendidikan atau keterampilan baru cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Investasi pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan secara langsung meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan individu maupun kolektif.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa modal manusia tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas faktor produksi, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja lintas sektor dan wilayah. Riddell (2011) dan Larionova (2015) menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama modal manusia memiliki efek positif terhadap penciptaan lapangan kerja, termasuk di negara-negara berkembang.

Dalam perspektif *New Growth Theory*, pendidikan dipandang sebagai investasi *human capital* yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan eksternalitas positif, efisiensi produksi melalui *returns to scale*, serta menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Todaro dalam Pancawati, 2000). Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk peningkatan keterampilan individu, tetapi juga sebagai fondasi bagi inovasi dan transformasi struktural perekonomian.

Pendidikan dan pelatihan yang adaptif berperan penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, akumulasi modal manusia merupakan proses berkelanjutan yang mencakup interaksi antara pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja (Vogl, 2012). Dalam konteks ini lembaga pendidikan berperan strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan karakteristik spasial wilayah tertentu (Hoxby, 2002).

Selanjutnya, Kim (2010) membedakan tiga elemen dalam teori modal manusia: pelatihan, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Ketiga elemen ini memiliki implikasi berbeda terhadap output tenaga kerja, namun akan lebih optimal apabila dikuasai secara simultan. Oleh karena itu, strategi pengembangan modal manusia perlu dirancang secara holistik agar mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mempercepat pengurangan kemiskinan struktural secara berkelanjutan. Menurut Kim (2010) Pendidikan merupakan proses dua arah, satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas (Kim, 2010). Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia suatu negara maka semakin meningkat efisiensi kerja dan produktivitasnya (Atmanti, 2005).

Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang sangat baik walaupun dengan

kekayaan sumber daya alam yang terbatas (Romer P. M., 1986 dan Lucas Jr. R. E., 1988). Ini menggambarkan fitur potensi manusia mempengaruhi hasil ekonomi dari wilayah tempat tinggal dan pekerjaannya sebagaimana dikemukakan Shishkina (2020). Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia, terutama dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan karakteristik spasial wilayah yang dituju atau tersedia (Hoxby, 2002).

Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, lembaga ini berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, mempercepat pengembangan teknologi, dan melahirkan generasi yang lebih adaptif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, akumulasi modal manusia merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan saling mempengaruhi satu sama lain (Vogl, 2012). Kim (2010) menegaskan bahwa konsep teoretis paling berpengaruh dalam analisis modal manusia terletak pada perbedaan antara pelatihan, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus, yang masing-masing memberikan implikasi berbeda namun akan optimal jika dikuasai secara simultan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas berperan krusial dalam menghindarkan masyarakat dari jebakan kemiskinan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.6. Teori Kelembagaan Sosial Ekonomi

Kemiskinan perdesaan bukan sekadar cerminan dari minimnya pendapatan, tetapi merupakan hasil dari keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang dibentuk oleh struktur kelembagaan yang ada. Dalam pandangan ekonomi kelembagaan baru, Douglass North (1990) menyatakan bahwa institusi baik formal seperti hukum dan kebijakan, maupun informal seperti norma dan jaringan sosial merupakan "aturan main" yang membentuk insentif dan perilaku aktor ekonomi. Ketika institusi bersifat eksklusif atau tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

misikin, maka ketimpangan dan kemiskinan cenderung bertahan dalam jangka panjang, meskipun intervensi pembangunan telah dilakukan.

Konsep ini diperkuat oleh Elinor Ostrom (1990) yang menekankan pentingnya institusi lokal dalam mengelola sumber daya secara kolektif. Dalam konteks perdesaan, kelembagaan informal seperti gotong royong, musyawarah desa, atau praktik pengelolaan lahan bersama sering kali menjadi mekanisme adaptif untuk bertahan di tengah keterbatasan. Namun, efektivitas institusi lokal ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, pola kepemimpinan, dan dukungan dari kebijakan nasional. Di sinilah relevansi pendekatan kelembagaan sosial-ekonomi menjadi nyata: bahwa kemiskinan adalah persoalan yang berakar pada struktur relasi sosial dan ekonomi yang lebih dalam, bukan sekadar defisit ekonomi.

Lebih jauh lagi, Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa negara dengan institusi inklusif yang menjamin akses luas terhadap peluang ekonomi dan partisipasi politik, cenderung berhasil mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebaliknya, institusi ekstraktif justru melanggengkan dominasi elite, mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan, dan menciptakan kemiskinan yang terstruktur. Dalam kerangka ini, studi tentang kemiskinan perdesaan di Indonesia perlu melihat tidak hanya variabel ekonomi dan spasial, tetapi juga bagaimana struktur kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun lokal membentuk peluang, kendala, dan arah pembangunan di wilayah perdesaan.

2.1.7. Teori Status Wilayah

Teori status wilayah atau regional status memiliki sejarah panjang dan mengalami perkembangan signifikan sejak awal abad ke-20, seiring dengan munculnya pemikiran-pemikiran tentang pembangunan dan ketimpangan antar wilayah. Pada tahap awal, teori ini dipengaruhi oleh teori lokasi dari Alfred Weber dan

Walter Christaller, yang menekankan bahwa efisiensi lokasi industri dan pusat ekonomi menentukan perkembangan wilayah. Akses terhadap pasar dan biaya transportasi menjadi faktor utama yang membedakan status ekonomi antara wilayah-wilayah yang berbeda (Chakravorty, 2000). Ini sedikit berbeda dengan North (1955) yang menyatakan bahwa teori status wilayah (*regional status*) berkembang dari studi awal terkait geografi ekonomi dan pembangunan regional, di mana para akademisi berusaha memahami perbedaan dalam perkembangan ekonomi antar wilayah. Sejak awal abad ke-20, pemikiran ini dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik yang menekankan peran sumber daya lokal, posisi geografis, dan konektivitas dalam menentukan status dan perkembangan suatu wilayah.

Pada 1960-an dan 1970-an, teori *core-periphery* muncul untuk menjelaskan ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat (*inti*) dan pinggiran (*periferi*). Teori ini menunjukkan bahwa sumber daya dan investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah inti, sedangkan wilayah periferi tertinggal karena keterbatasan akses terhadap modal dan infrastruktur. Model ini mencerminkan pola ketergantungan yang membuat wilayah pinggiran sulit berkembang tanpa intervensi dari pemerintah pusat atau aktor eksternal (Friedmann, 1983). Pada saat yang sama, muncul teori ketergantungan yang lebih menekankan pada hubungan antara negara maju dan berkembang. Ketergantungan ekonomi pada negara pusat, termasuk dalam bentuk investasi dan ekspor bahan mentah, memperburuk ketimpangan wilayah di negara berkembang. Wilayah pinggiran seringkali menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapat manfaat dari nilai tambah yang tercipta di wilayah atau negara pusat (Soja, 2009).

Memasuki dekade 1980-an, teori pertumbuhan endogen mulai memperkaya diskusi tentang status wilayah. Teori pertumbuhan endogen adalah teori ekonomi yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya bergantung pada faktor eksternal (seperti investasi asing atau perdagangan internasional), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dalam wilayah tersebut. Faktor-faktor ini meliputi

inovasi teknologi, akumulasi modal manusia, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah (Romer, P.M., 1986; Lucas, R.E., 1988; Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X., 1991).

Dalam konteks status wilayah, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa wilayah maju lebih mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena memiliki infrastruktur yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih terampil, dan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Sebaliknya wilayah tertinggal cenderung menghadapi hambatan dalam pertumbuhan karena keterbatasan modal manusia, akses teknologi, dan infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah dan nasional memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti investasi dalam pendidikan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur (Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X., 1995).

Secara keseluruhan, teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki kekuatan sumber daya internal cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan wilayah yang bergantung pada faktor eksternal. Kapasitas wilayah dapat dibangun melalui inovasi, kewirausahaan, serta pengembangan kluster industri lokal yang saling terintegrasi. Dalam konteks ini, peran kebijakan pemerintah menjadi penting dalam mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing wilayah secara keseluruhan (Nijkamp & Abreu, 2020).

Memasuki dekade 2000-an, proses globalisasi dan munculnya gelombang regionalisasi baru telah mengubah cara pandang terhadap status wilayah. Wilayah tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif aliran investasi, melainkan sebagai aktor aktif yang mampu terhubung dengan ekonomi global melalui jaringan dan institusi regional. Fenomena ini dikenal sebagai *new regionalism*, yaitu pendekatan yang melihat wilayah sebagai pusat kekuatan ekonomi dan politik baru dalam lanskap global (Hettne & Söderbaum, 2000). Sejalan dengan itu, perhatian terhadap tata kelola dan kebijakan pembangunan regional semakin berkembang. Pemerintah daerah

memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya saing wilayah melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan institusi lokal menjadi instrumen kunci dalam memperkuat ekonomi wilayah dan menarik investasi domestik maupun asing (Chakravorty, 2002).

Konsep kompetensi wilayah mulai diperkenalkan awal abad ke-21, yang mengacu pada kemampuan suatu daerah beradaptasi, berinovasi, dan membangun institusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Wilayah dengan kompetensi tinggi, mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan meningkatkan status dalam sistem ekonomi global (Lawson, 1999). Kemajuan teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan mempercepat transformasi status wilayah. Wilayah yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan membangun kapasitas inovatif menjadi pusat pertumbuhan baru. Sebaliknya, wilayah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal dan menghadapi risiko stagnasi ekonomi (Eversole, 2017). Perkembangan teori status wilayah mencerminkan upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pembangunan regional. Dari fokus awal pada lokasi dan aglomerasi hingga konsep kompetensi dan regionalisasi baru, teori ini terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pada akhirnya, teori status wilayah dapat menjelaskan ketimpangan regional dan memberikan panduan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara nasional kondisi perdesaan yang minim fasilitas di kategorikan sebagai desa tertinggal. Desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim (UU No. 6 Tahun 2014). Desa tertinggal merupakan salah satu status desa dalam klasifikasi perdesaan secara nasional. Adapun penetapan status desa sejak tahun 2015 berpatokan pada suatu ukuran yang dikenal sebagai Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks

Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IKS mengukur akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial terdiri dari 38 indikator dengan skor masing-masing sebesar 0,87 persen; IKE melihat keberlanjutan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, dan lapangan pekerjaan, terdiri 12 indikator dengan skor masing-masing sebesar 2,75 persen; dan IKL menilai pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi dampak lingkungan, terdiri empat indikator dengan skor masing-masing sebesar 8,25 persen (Lampiran 4.).

IDM digunakan untuk menilai dan memotret kondisi desa berdasarkan lima kategori: (1) Desa sangat tertinggal, dengan nilai $IDM \leq 0,4907$, menunjukkan desa dengan keterbatasan parah dalam akses pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi; (2) Desa tertinggal, dengan nilai $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, yang mencerminkan adanya peningkatan, namun masih mengalami kekurangan layanan dasar dan keterbatasan ekonomi; (3) Desa berkembang, dengan nilai $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, menggambarkan desa yang mulai menunjukkan perbaikan ekonomi dan akses layanan sosial meskipun belum optimal; (4) Desa maju, dengan nilai $0,7072 < IDM \leq 0,8155$, mencerminkan desa yang telah memiliki infrastruktur memadai dan ekonomi yang tumbuh; dan (5) Desa mandiri, dengan nilai $IDM > 0,8155$, yang menunjukkan desa mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan memiliki kemandirian ekonomi serta sosial yang tinggi (Kementerian Desa PDTT, 2023).

2.1.8. Struktur Ekonomi

Kemiskinan dalam konteks perdesaan tidak hanya dapat dipahami sebagai kekurangan pendapatan atau aset, melainkan juga sebagai manifestasi dari stagnasi struktur ekonomi lokal. Teori struktur ekonomi menekankan bahwa pola dan perubahan komposisi sektoral antara sektor pertanian, industri, dan jasa, sangat menentukan kapasitas wilayah dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Dalam teori

klasiknya, W. Arthur Lewis (1954) menjelaskan bahwa negara-negara berkembang umumnya memiliki struktur ekonomi ganda, yaitu sektor tradisional berbasis pertanian subsisten yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar namun produktivitas rendah, dan sektor modern (industri atau jasa) yang padat modal dan berproduktivitas tinggi. Ketimpangan dan kemiskinan muncul ketika sebagian besar penduduk terkunci dalam sektor tradisional, sementara akses terhadap sektor modern sangat terbatas.

Pentingnya transformasi struktural ini dipertegas oleh Hollis Chenery dan Moises Syrquin (1975) yang menunjukkan bahwa proses pembangunan yang efektif selalu ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan sumber daya dari pertanian ke sektor industri dan jasa. Namun, pergeseran ini tidak terjadi otomatis. Diperlukan intervensi kelembagaan, kebijakan sektoral, serta pembangunan infrastruktur pendukung agar masyarakat perdesaan dapat ikut serta dalam proses transformasi tersebut. Tanpa dukungan kebijakan yang terarah, wilayah perdesaan tetap berada dalam ketergantungan terhadap sektor pertanian primer berisiko tinggi dan rendah nilai tambah. Akibatnya, desa-desa sangat tertinggal sulit keluar dari perangkap kemiskinan struktural.

Selain itu, Simon Kuznets (1955) menambahkan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal transformasi ekonomi, ketika hanya sebagian wilayah atau kelompok yang berhasil mengakses sektor modern. Ketika struktur ekonomi menjadi lebih merata dan inklusif, ketimpangan cenderung menurun. Hal ini menegaskan bahwa perubahan struktur ekonomi harus dibarengi dengan strategi redistribusi dan penguatan kapasitas lokal, agar transisi sektoral tidak hanya dinikmati oleh wilayah perkotaan atau kelompok elite. Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur ekonomi lokal menjadi penting dalam menjelaskan mengapa beberapa desa tetap miskin meskipun telah mendapatkan alokasi kebijakan yang sama, dan mengapa strategi pengurangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakter sektoral masing-masing wilayah.

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1. Kebijakan Makroekonomi dan Kemiskinan Perdesaan

Kebijakan makroekonomi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan makroekonomi yang umum digunakan untuk mengatasi kemiskinan di berbagai negara adalah kebijakan fiskal dan moneter atau perpaduan antara keduanya untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Fan S., Et all., 2000; Jalan, J., & Ravallion, M., 2003; Dercon S., et all., 2009; Khandker S. R., et all., 2006;).

Transfer fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang berperan krusial dalam penanggulangan kemiskinan perdesaan. Melalui program transfer tunai, subsidi, dan bantuan sosial, pemerintah membantu masyarakat perdesaan untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha dan mengakses layanan kesehatan serta pendidikan yang lebih baik. Transfer fiskal juga mendukung pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayah pedesaan dan meredam dampak kebijakan yang memicu terjadinya inflasi. Dengan demikian, kebijakan transfer fiskal tidak hanya mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, tetapi juga memfasilitasi implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga memberikan dampak langsung dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan (Bruno G. dan Easterly W., 1998; Ravallion, M., 2012; Lustig, N., 2018; World Bank, 2018; Nursini and Tawakkal 2019).

Transfer fiskal dalam bentuk desentralisasi fiskal merupakan suatu kondisi penting (*necessity condition*) yang diperlukan karena dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan kebutuhan keuangan menjadi komponen penting bagi pemerintah daerah (Gedeona , 2008; Akai N. dan Sakata M., 2012; Sasana H., 2015; Abdillah, 2016; Sow M. dan Razafimahefa I.F., 2017; Zhang, T. dan Zou, H., 2018). Hasil penelitian Fisz dan Shapiro (2011) pada 51 negara berkembang selama 26 tahun

menggunakan model FE dan RE panel menunjukkan transfer fiskal yang diterapkan dengan tepat, signifikan mengurangi kemiskinan di tingkat lokal, walaupun inflasi mengurangi nilai riil transfer tersebut, oleh karena itu keberhasilan transfer fiskal dalam mengentaskan kemiskinan sangat bergantung pada stabilitas harga serta kualitas kelembagaan di masing-masing negara. Ini senada dengan temuan Maharajabdinul et al (2015), Sasana (2015) dan Lustig (2018).

Penelitian Maharajabdinul et al. (2015) pada delapan provinsi selama sembilan tahun dengan menggunakan model FE dan RE menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal melalui transfer pembayaran dan kapasitas pengeluaran daerah secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan meskipun efeknya bervariasi antar provinsi tergantung pada kualitas kelembagaan dan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian Sasana (2015) pada 34 provinsi selama periode 2005–2014 dengan metode yang sama menemukan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi juga menekan laju inflasi. Adapun Lustig (2018) menemukan bahwa kebijakan fiskal progresif secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks institusional masing-masing negara.

Inflasi, meskipun secara umum dipahami sebagai variabel ekonomi yang mencerminkan hasil dari intervensi kebijakan fiskal maupun moneter, kerap menjadi ancaman serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa inflasi tidak jarang dipicu oleh kebijakan pemerintah sendiri, seperti penyesuaian harga dan pengurangan subsidi. Misalnya, penghapusan subsidi dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang sebelumnya disubsidi, yang kemudian memicu efek berantai berupa peningkatan harga barang dan jasa lainnya dalam lebih dari satu putaran. Dampak langsung dari proses ini adalah penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan.

Myrdal (1968) menekankan bahwa inflasi bukan sekadar fenomena moneter, melainkan bagian dari dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Di negara-negara berkembang, inflasi mencerminkan ketimpangan struktural yang melekat dalam sistem sosial dan ekonomi, sehingga tidak dapat diatasi semata-mata melalui kebijakan teknis. Dalam pandangan ini, pendekatan pengendalian inflasi yang bersifat teknokratis dan mengabaikan dimensi sosial justru berpotensi memperdalam ketidaksetaraan dan menciptakan instabilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan struktural menjadi penting, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek distribusi pendapatan, perlindungan sosial, dan inklusi ekonomi agar pengendalian inflasi tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan kelompok miskin.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi cenderung memperburuk tingkat kemiskinan, karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin (Bruno & Easterly, 1998; Friedman, 1968; Koren, 2002; Bernanke & Mihov, 1998). Dalam konteks ini, diperlukan kerangka kebijakan moneter yang mampu menambatkan ekspektasi inflasi secara kredibel dan konsisten. Salah satu pendekatan yang telah banyak diadopsi adalah Inflation Targeting Framework (ITF), yakni suatu kerangka kebijakan moneter yang menetapkan target inflasi secara eksplisit sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.

Penerapan ITF menuntut adanya koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah, guna memastikan bahwa upaya menjaga stabilitas harga tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan inklusif. Penelitian oleh Svensson (2000), Clarida, Galí, dan Gertler (1999), serta Orphanides (2003) dan Weber (2003) menegaskan bahwa keberhasilan ITF sangat bergantung pada kredibilitas institusi, transparansi kebijakan, serta sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjawab tantangan ekonomi domestik.

Bank Indonesia secara resmi mengadopsi ITF pada Juli 2005, menggantikan kebijakan sebelumnya yang berbasis pada pengendalian agregat moneter dan nilai tukar. Adopsi ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk mengendalikan inflasi pasca krisis ekonomi 1997–1998 serta menciptakan stabilitas makroekonomi yang lebih berkelanjutan. ITF dipilih karena dinilai lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi domestik maupun global (Alamsyah et al., 2001). Meskipun ITF terbukti mampu menurunkan tingkat inflasi secara signifikan, efektivitasnya dinilai belum optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan volatilitas harga komoditas, khususnya pangan dan energi, yang sebagian besar merupakan *administered prices* atau harga yang diatur pemerintah (Harmanta & Waluyo, 2011; Erica, 2015; Wanasilp, 2021).

Fenomena ini juga ditemukan dalam studi Bleaney dan Greenaway (2001) di 30 negara berkembang serta Müller (2008) di 21 negara OECD, yang menunjukkan bahwa penghapusan subsidi bahan bakar memang dapat memperbaiki posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan tekanan inflasi jangka pendek yang berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kehadiran kebijakan pelengkap, seperti program transfer sosial, untuk mengurangi dampak regresif dari kebijakan tersebut.

Sejak tahun 2015, Bank Indonesia mulai menerapkan Flexible Inflation Targeting Framework (FITF), yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengambilan kebijakan. Berbeda dengan kerangka sebelumnya, FITF tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter terhadap kondisi ekonomi yang dinamis, termasuk fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas global (Zainuri et al., 2020). Selain itu, FITF juga mendorong koordinasi yang lebih erat antara kebijakan moneter dan fiskal, serta memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, guna mendukung pemulihan

ekonomi nasional secara inklusif (Hendar, 2016; Sari & Yewiwati, 2019; Hossain & Raghavan, 2020; Zainuri et al., 2020).

Disisi lain beberapa penelitian menemukan bahwa transfer fiskal cenderung menguntungkan masyarakat sektor non-pertanian dibandingkan masyarakat sektor pertanian yang merupakan mayoritas di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ekonomi dan kemiskinan di perdesaan belum mengalami pertumbuhan dan pengurangan yang berarti selama penerapan desentralisasi fiskal. (Otheliansyah, 2021; Putra, S., & Nugroho, B., 2016; Fisz, T. M., & Shapiro, M. R., 2011; Maipita, I., et al., 2010). Tahun 2015, setelah melalui proses kajian selama kurang lebih tujuh tahun pemerintahan melaksanakan program transfer yang bersifat *pro-poor growth* fokus wilayah perdesaan yaitu Dana Desa.

Dana Desa menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka membangun perekonomian membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan perdesaan yang selanjutnya dapat mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Dana Desa dialokasikan dalam APBN sebesar 10 persen sejak tahun 2015 hingga saat ini. Alokasi tersebut didistribusikan ke seluruh desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan (Kemenkeu, 2017). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan perekonomian desa, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas pelayanan publik di wilayah yang diteliti (Handra H., 2019; Frikriman A., 2020; Sofi, I., 2020; Otheliansyah dan Yasni, 2021).

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji, efektivitas kebijakan makroekonomi terhadap pengentasan kemiskinan perdesaan menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada pendekatan fiskal dan moneter yang diterapkan di berbagai

wilayah dan periode waktu. Beberapa studi menemukan bahwa kebijakan transfer fiskal dan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar (Faguet, 2004; Martinez-Vazquez & McNab, 2006; Skoufias et al., 2011). Namun demikian, terdapat pula temuan yang menunjukkan bahwa kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan sektor non-pertanian dibandingkan sektor pertanian—yang justru merupakan tulang punggung perekonomian perdesaan. Akibatnya, pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan perdesaan masih bersifat terbatas (Fan et al., 2005; Anderson & Feder, 2007).

Dari sisi pendekatan metodologis, perbedaan dalam menilai efektivitas kebijakan juga muncul antara studi kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif umumnya menekankan signifikansi statistik menggunakan model-model ekonometrika seperti Fixed Effects atau Random Effects untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel (Wooldridge, 2013). Sebaliknya, pendekatan kualitatif lebih fokus pada pemahaman kontekstual melalui studi kasus, wawancara mendalam, dan analisis kelembagaan yang mengeksplorasi bagaimana proses dan aktor lokal memengaruhi implementasi kebijakan (Chambers, 1997; Mosse, 2005).

Dalam konteks kebijakan Dana Desa dan pengendalian inflasi sebagai instrumen makroekonomi, kajian dampaknya terhadap kemiskinan perdesaan secara kuantitatif masih relatif terbatas. Beberapa studi awal menemukan bahwa Dana Desa memiliki potensi dalam memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada tata kelola dan kapasitas kelembagaan desa (Pratama, 2018; Rohman & Sutaryo, 2020). Sementara itu, inflasi yang tinggi berisiko menggerus daya beli masyarakat miskin, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi (Bruno & Easterly, 1998; Friedman, 1968), sehingga pengendalian inflasi menjadi komponen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan

kualitatif diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks sosial dan spasial perdesaan di Indonesia.

2.2.2. Karakteristik Lokal dan Kemiskinan Perdesaan

Karakteristik lokal memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), aktivitas kelembagaan sosial ekonomi, dan status desa secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kualitas SDM yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja, menjadi determinan utama dalam membentuk kapasitas produktif penduduk perdesaan untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik (Todaro & Smith, 2020; Schultz, 1961). Individu dengan pendidikan dan keterampilan lebih tinggi cenderung memiliki kemungkinan lebih besar keluar dari kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif.

Selain itu, keberadaan dan efektivitas kelembagaan sosial ekonomi—seperti koperasi, kelompok tani, lembaga keuangan mikro, serta program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah—berkontribusi besar dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung peningkatan pendapatan dan mobilitas sosial (North, 1990; Uphoff, 1992). Kelembagaan yang inklusif mampu menyediakan akses terhadap modal, informasi, serta jaringan pasar, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga perdesaan.

Status desa juga merupakan aspek penting yang mencerminkan tingkat akses terhadap infrastruktur dasar, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta intensitas intervensi kebijakan yang diterima dari pemerintah (World Bank, 2021). Desa dengan status berkembang atau maju umumnya memiliki fasilitas dan dukungan yang lebih memadai dibandingkan dengan desa tertinggal, sehingga lebih mampu memberikan peluang pertumbuhan ekonomi bagi penduduknya. Dengan

demikian, pemahaman terhadap karakteristik lokal menjadi kunci dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Kebijakan yang mempertimbangkan dimensi lokal ini cenderung lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan (Chambers, 1983; Ellis & Biggs, 2001).

A. Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan Perdesaan

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun pelatihan khusus menjadi modal manusia yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pekerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik cenderung lebih produktif dan mampu menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan pekerja yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai (Psacharopoulos & Patrinos, 2018; Spring, 2015; Hanushek & Woessmann, 2008; Becker, 1994; Schultz, 1961).

Investasi dalam pendidikan dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan biayanya karena dapat meningkatkan pendapatan, produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Dao (2008) dan George (2023) mengungkapkan bahwa peningkatan modal manusia berperan dalam memperbaiki distribusi pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan pendidikan dan keterampilan memungkinkan akses terhadap pekerjaan yang lebih baik serta mendorong mobilitas sosial.

Selain meningkatkan pendapatan individu, modal manusia juga berperan dalam pembangunan ekonomi secara lebih luas. Bashyal (2009) dan Bombiak & Marcysiak (2018) mengungkap bahwa pengembangan sumber daya manusia di pedesaan mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, yang menjadi salah satu

tulang punggung ekonomi lokal. Dalam konteks pertanian, Li (2010), Ai-La (2013) dan Larionova (2015) menemukan bahwa investasi dalam pendidikan petani di perdesaan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan juga menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan rumah tangga perdesaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan modal manusia tidak hanya membantu individu dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan modal manusia di daerah perdesaan juga memiliki kaitan erat dengan kebijakan makroekonomi yang diterapkan. Olopade et al. (2019) menemukan bahwa di negara-negara anggota OPEC, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun negara-negara tersebut kaya akan sumber daya alam. Kebijakan publik yang mendukung akses pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Tang, Sun, & Yang (2021) di China menunjukkan bahwa program pensiun perdesaan dapat mendorong investasi dalam modal manusia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing tenaga kerja di daerah perdesaan.

Selain itu, modal manusia juga memiliki peran strategis dalam memutus siklus kemiskinan antar generasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jing (2022) di Tibet menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan keterampilan secara signifikan membantu mengurangi risiko transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amsden (2010) juga menekankan bahwa kurangnya perhatian terhadap pengembangan modal manusia dapat menyebabkan kemiskinan yang terus berlangsung dan membatasi mobilitas sosial. Oleh karena itu, pengembangan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan perlu dipandang sebagai upaya jangka

panjang dalam mengatasi kemiskinan struktural, bukan hanya sebagai strategi sementara.

Selanjutnya, penelitian Cheng et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam strategi konsolidasi lahan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan modal manusia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan-kebijakan lain yang mendukung, seperti reformasi lahan dan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa peningkatan modal manusia dapat berkontribusi optimal dalam pengentasan kemiskinan perdesaan.

B. Kelembagaan Sosial Ekonomi Koperasi dan Kemiskinan Perdesaan

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah perdesaan. Negara-negara maju telah mencatat kesuksesan dalam perekonomian yang sebagian besar dipengaruhi oleh peran lembaga perekonomian yang dinamakan koperasi (Mokyr, 1974; De Vries & Van der Woude, 1997; Van Zanden & Van Riel, 2004 dalam Ogilvie & Carus, 2014). Atas dasar keberhasilan tersebut, koperasi dikembangkan dan diposisikan sebagai soko guru dalam sistem perekonomian Indonesia untuk mendukung kesejahteraan masyarakat perdesaan (Sitepu, 2018; Masikome, 2019). Sebagai lembaga sosial ekonomi yang tumbuh dari dan untuk masyarakat, koperasi telah berperan dalam membangun karakter ekonomi bangsa selama lebih dari setengah abad. Meskipun koperasi merupakan organisasi berbasis anggota, keberadaannya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat umum, terutama dalam memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat perdesaan (Munker, 2016 dalam Maddocks, 2019).

Dalam perekonomian perdesaan, koperasi baik yang berskala besar maupun kecil menempati posisi strategis dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pelayanan publik. Koperasi berskala besar cenderung memiliki profitabilitas tinggi yang memungkinkan perputaran ekuitas dengan lebih cepat. Di sisi lain, koperasi berskala kecil sering kali mendapatkan keuntungan dari diversifikasi produk yang mereka hasilkan (Hannachi et al., 2020; Briggeman et al., 2016; Pokharel et al., 2020). Pada masa inflasi dan dalam sistem ekonomi komando, koperasi berperan penting sebagai lembaga distribusi kebutuhan masyarakat. Banyak koperasi yang bertransformasi menjadi koperasi serba usaha untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat (Sukotjo, 1978 dalam Sunartiningsih, 2012). Hal ini menunjukkan fleksibilitas koperasi dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi.

Koperasi di daerah perdesaan, khususnya di desa tertinggal dan sangat tertinggal, memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh kebutuhan produksi dan konsumsi meskipun sarana dan prasarana yang tersedia terbatas. Keterbatasan sumber daya dari pemerintah lokal dan kurangnya kebijakan yang sesuai dengan kondisi unik perdesaan menuntut peran koperasi dalam mengisi kekosongan tersebut (Halseth & Ryser, 2010). Reformasi sistem hak milik kolektif perdesaan, kepemimpinan, modal sosial, dan tindakan kolektif terbukti berdampak positif terhadap kinerja ekonomi koperasi di daerah perdesaan (Wang & Wang, 2023). Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan.

Lebih jauh lagi, koperasi pertanian berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin pembangunan terpadu di wilayah pedesaan (Shpykuliak & Sakovska, 2020). Koperasi memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan politik perempuan dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan (Basnet, 2023). Peran koperasi dalam menggerakkan pembangunan pedesaan juga

terkait dengan peningkatan modal ekonomi, budaya, dan sosial di daerah tersebut serta mendorong kewirausahaan dan perekrutan tenaga kerja (Šljukić, 2007). Selain itu, keberadaan koperasi sosial di Italia sejak tahun 1990-an memperkuat motivasi kerja sama di bidang pertanian yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga mencakup inisiatif komunitas dan solidaritas (Fonte & Cucco, 2017).

Secara keseluruhan, koperasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih adil di daerah perdesaan, bahkan dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif (Altman, 2015). Peran koperasi dalam mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya membuatnya menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat perdesaan.

Kemiskinan kerap menjadi pendorong untuk manusia berusaha dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, namun dalam berusaha seringkali modal menjadi kendala tidak tersedia karena miskin. Pada kondisi seperti ini Lembaga Keuangan Mikro atau dikenal masyarakat perdesaan Indonesia sebagai koperasi memiliki peranan penting. Tinjauan (Agrawal et al., 2008) pada 50 kasus menunjukkan bahwa koperasi memfasilitasi hubungan yang lebih besar antar lembaga – baik di dalam lokalitas maupun lintas tingkat, sebagai lembaga yang berada di tingkat lokal koperasi dan IMK dapat berkembang baik dengan biaya yang kecil. Hasil penelitian Ayoo (2012) menemukan fakta bahwa lembaga keuangan mikro atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat menghilangkan hambatan inovasi, kewirausahaan, memberikan insentif kepada pelaku usaha dan menerapkan tindakan afirmatif. Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya memberikan kredit kepada peminjam kecil yang tidak dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan formal, tetapi juga memobilisasi tabungan domestik dan menyalurkan tabungan tersebut untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Peran Koperasi sangat penting bagi usaha berskala kecil yang

menghadapi kendala pembiayaan dan rendahnya akses kredit ke perbankan baik karena jarak ataupun kelengkapan administrasi. Keberadaan koperasi yang tersebar hingga ke pelosok perdesaan menjadi solusi permodalan bagi perkembangan industri mikro krcil yang kemajuannya dapat mengurangi angka kemiskinan.

C. Status Desa dan Kemiskinan Perdesaan

Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi umumnya ditemukan pada perdesaan yang minim akan layanan publik, infrastuktur dan perlindungan sosial (Nations, 2021). Menurut Bidani dan Ravallion (1993) minimnya fasilitas publik di suatu daerah akan menciptakan biaya hidup tinggi dan meningkatkan jumlah kemiskinan. Padahal menurut Janvry dan Sadoulet (2009) kemudahan akses terhadap berbagai pelayanan publik dimana masyarakat miskin berada memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatannya dan terlepas dari kemiskinan. Kondisi ketertinggalan perdesaan seakan identik dengan perangkat kemiskinan, menurut Medeiros et al. (2021) perbedaan besar dalam hal infrastruktur antara perdesaan dan perkotaan menciptakan kesenjangan yang ditandai oleh sebagian besar penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Adapun semakin baik kondisi infrastruktur di suatu wilayah, tingkat kemiskinan wilayah tersebut cenderung semakin rendah (Yahya and Agustina 2022; Nurmala and Hutagaol 2022; Reardon 1998)

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Kualitas hidup suatu desa kerap kali dikaitkan dengan status desa, di mana desa tertinggal umumnya memiliki infrastruktur dan layanan dasar yang tidak memadai, sementara desa mandiri mencerminkan kondisi sebaliknya, yakni ketersediaan infrastruktur yang baik serta akses terhadap pelayanan publik yang lebih lengkap. Menurut Saudi et al. (2021), ketimpangan antar daerah sebagian besar bersumber dari proses pembangunan yang bersifat spasial. Dalam konteks ini, investor

cenderung memilih berinvestasi di wilayah yang telah maju karena adanya kemudahan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. Ketimpangan investasi ini kemudian memperlebar jurang pembangunan antara desa tertinggal dan desa maju.

Studi oleh Hanna (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai di perdesaan mampu mendorong berkembangnya sektor non-pertanian, kewirausahaan lokal, serta pola kemitraan dari bawah ke atas (*bottom-up partnership*). Infrastruktur yang baik juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan pertanian, yang secara keseluruhan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi perdesaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fan et al. (2015) dan Ali (2003), yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur perdesaan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Efek positif tersebut terutama berasal dari meningkatnya kesempatan kerja di sektor non-pertanian dan naiknya upah tenaga kerja perdesaan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan siklus peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Handoyo (2021) menemukan bahwa peningkatan status desa—yang tercermin dalam indeks desa membangun (IDM)—berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perdesaan. Semakin tinggi pencapaian suatu desa menuju status desa mandiri, maka semakin rendah pula tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Peningkatan IDM tidak hanya mencerminkan kemajuan pembangunan, tetapi juga berperan dalam memperkecil kesenjangan antarwilayah dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di pedesaan.

2.2.3. Struktur Ekonomi dan Kemiskinan Perdesaan

A. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan

Salah satu ciri yang paling mencolok dari proses pertumbuhan menurut Kuznet adalah transformasi struktur ekonomi yang sistematis, dimana bentuk utamanya

merupakan perubahan komposisi PDB yang berasal dari tiga sektor utama ekonomi yaitu pertanian, industri dan jasa (Sundrum, 1990). Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang memainkan peran mendasar dan merupakan elemen strategi pembangun dalam perekonomian pada negara-negara berkembang (Hidayah I., 2022; Hidayat dan Rahayu, 2019; Briones R.M., 2013). Pada masa awal perkembangan ekonomi, sektor pertanian sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber pendapatan dan berperan penting sebagai penyedia modal, tenaga kerja dan sumber permintaan efektif yang mendukung berkembangnya sektor lainnya seperti; industri dan jasa hampir di sebagian besar negara di dunia (Kuznets dalam Sadoulet and Janvry, 2009)

Pertumbuhan produktivitas pertanian lebih mungkin mengurangi kemiskinan pedesaan secara efektif, karena menghasilkan pendapatan bagi petani miskin, menyediakan lapangan kerja yang memperlambat migrasi pedesaan ke perkotaan dan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari pedesaan. Peningkatan produktivitas pertanian juga menghasilkan harga pangan yang lebih rendah yang menguntungkan penduduk miskin pedesaan dan perkotaan (Park dan Moon, 2019; Irz X., et al., 2001; Mellor J.W., 2001; Christiaensen et al., 2011; Diao et al., 2010). Ini sejalan dengan yang ditemukan Cervantes-godoy dan Dewbre (2010) bahwa di negara berkembang, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian oleh karenanya pertumbuhan pertanian menjadi penting karena produktivitas pertanian yang tinggi menyediakan pangan dan input yang terjangkau bagi masyarakat dan sektor industri maupun jasa.

Peran sektor pertanian secara konvensional ditunjukkan oleh besarnya persentase Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Diberbagai negara berkembang pangsa PDB sektor pertanian menunjukkan kecenderungan menurun walaupun peranannya dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup besar demikian juga keterkaitannya dengan

sektor lain, ini menunjukkan sifat sektor pertanian yang dinamis dan memiliki hubungan yang luas (Fei dan Ranis, 1968; dan Mellor, 1995). Pertumbuhan sektor pertanian sering kali dianggap sebagai salah satu strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan. Penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian dapat berperan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Menurut Thirtle, Lin, dan Piesse (2003), pertumbuhan produktivitas pertanian memiliki dampak pengurangan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Peningkatan produktivitas ini memungkinkan petani kecil untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Selain itu, pembangunan sektor pertanian yang inklusif dapat memperbaiki akses terhadap pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Studi oleh Datt dan Ravallion (1998) menunjukkan bahwa di India, pertumbuhan sektor pertanian yang didukung oleh infrastruktur yang memadai dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Peningkatan akses terhadap pasar melalui perbaikan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas transportasi mempermudah petani kecil dalam memasarkan hasil produksinya. Dengan demikian, pertumbuhan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan sektor pertanian juga berdampak memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Menurut Timmer (2010), peningkatan produksi pangan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan yang sering kali berdampak buruk terhadap kelompok miskin. Selain itu, diversifikasi usaha tani yang melibatkan produksi tanaman bernilai tinggi dapat memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga miskin, sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Meskipun sektor pertanian sering dianggap sebagai penggerak utama dalam pengurangan kemiskinan perdesaan, beberapa penelitian mengungkapkan adanya pengaruh sebaliknya yang dapat muncul dari dinamika pertumbuhan sektor ini. Salah satu argumen utama yang mendukung pandangan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang terlalu berfokus pada peningkatan produktivitas tanpa diikuti dengan pemerataan akses terhadap sumber daya dapat memperburuk ketimpangan ekonomi di daerah perdesaan. Birdsall (2007) mengamati bahwa di Amerika Latin pada era 1970-1980, pertumbuhan sektor pertanian tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh pemilik lahan besar, sementara petani kecil kurang mendapatkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa distribusi sumber daya yang adil, peningkatan produktivitas pertanian dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat di perdesaan. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor pertanian yang mengandalkan mekanisasi dan modernisasi seringkali mengorbankan tenaga kerja tradisional yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat miskin. Penelitian oleh Fonte & Cucco (2017) menunjukkan bahwa transformasi pertanian yang mengarah pada industrialisasi dan penggunaan teknologi canggih dapat mengakibatkan pengurangan kesempatan kerja di pedesaan. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan bagi petani kecil yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan.

Di sisi lain, reformasi lahan yang tidak efektif dan kebijakan yang tidak mendukung petani kecil dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi masyarakat miskin. Menurut Wang & Wang (2023), upaya reformasi hak milik kolektif perdesaan yang tidak memperhatikan aspek pemerataan dapat memperlebar jurang ekonomi antara petani besar dan kecil. Hal ini diperkuat oleh penelitian Basnet (2023) yang menunjukkan bahwa pengembangan koperasi di pedesaan seringkali lebih

menguntungkan petani dengan modal besar, sementara petani kecil tidak mendapatkan manfaat yang signifikan.

Selain itu, ketergantungan terhadap komoditas tertentu dalam pertanian dapat menjadi sumber kerentanan ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Shpykuliak & Sakovska (2020) menyoroti bahwa koperasi pertanian yang mengandalkan satu jenis komoditas cenderung menghadapi risiko ekonomi yang lebih besar ketika harga pasar mengalami fluktuasi. Dalam kondisi tersebut, petani kecil yang tidak memiliki diversifikasi pendapatan rentan jatuh ke dalam kemiskinan ketika hasil produksi mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan perdesaan, terdapat berbagai dinamika yang dapat menyebabkan dampak sebaliknya terhadap masyarakat miskin. Pengabaian terhadap pemerataan akses, ketergantungan terhadap komoditas tertentu, serta kebijakan yang tidak mendukung petani kecil menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan manfaat perlu diterapkan agar pertumbuhan sektor pertanian dapat secara efektif mengurangi kemiskinan perdesaan.

2.2.3. Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Kemiskinan Perdesaan

Industri awal yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan pertanian adalah usaha-usaha kecil berbasis pertanian, sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat, dan kedua sektor ini memiliki konektivitas dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ((J. C. H. Fei and Ranis 1968). Industri Mikro Kecil seperti itu menawarkan peluang kerja bagi pekerja dengan produktivitas rendah dan memberi kesempatan bagi petani untuk meningkatkan pendapatan (Kinda dan Loening, 2010). Industrialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung membawa perubahan bagi penduduk maupun lingkungan sekitarnya. industrialisasi dalam konteks ekonomi

dilihat sebagai usaha transformasi masyarakat pertanian ke arah masyarakat yang bersifat industrial (Kuznets S., 1973; Timmer C.P., 1988; Syrquin M., 1988). Menurut Chenery (1982) perubahan karena adanya industrialisasi tidak hanya pada perubahan struktur ekonomi saja, namun merupakan suatu rangkaian perubahan yang terkait satu sama lain, mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan laporan World Bank (2007) banyak industri tumbuh sebagai dampak dari perubahan komposisi output dan diversifikasi pertanian secara luas yang dikenal sebagai transisi agribisnis. Transformasi pertanian menumbuhkan-kembangkan industri (agro-pengolahan) dan jasa (keuangan, logistik, pemasaran, dll.) secara paralel dan akan optimal dengan memastikan lingkungan kebijakan makro yang sehat dan mendukung. Penelitian terkait pengaruh industri mikro kecil terhadap kemiskinan perdesaan umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran sektor ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pendapatan. Industri mikro kecil dianggap memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi perdesaan karena karakteristiknya yang padat karya, fleksibel, dan berorientasi pada pasar lokal. Selain itu, industri ini sering kali menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat perdesaan yang tidak memiliki akses terhadap sektor formal. Kinda dan Loening (2010) menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengukur dampak pertumbuhan industri kecil terhadap pengurangan kemiskinan di beberapa wilayah perdesaan di Afrika Sub-Sahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri mikro kecil yang berkembang pesat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menciptakan peluang kerja baru.

Penelitian Awaliyyah et al. (2020) menggunakan metode data panel dinamis dengan teknik Generalized Method of Moments (GMM) untuk menganalisis dampak industri mikro kecil terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini

menemukan bahwa pertumbuhan sektor industri mikro kecil berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan perdesaan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dengan keterampilan rendah. Hal ini juga menunjukkan bahwa industri mikro kecil dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

Oyeyinka-Oyelaran dan Lal (2017) mengadopsi pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif untuk mengevaluasi dampak industri mikro kecil terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan di Nigeria. Penelitian ini menekankan pentingnya akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar dalam mendukung pertumbuhan industri mikro kecil. Temuan mereka mengungkap bahwa industri mikro kecil yang berhasil mengakses sumber daya tersebut mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan di daerah perdesaan. Penelitian Ogilvie dan Carus (2014) mengkombinasikan analisis regresi dan wawancara mendalam untuk menilai dampak industri mikro kecil terhadap pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan industri mikro kecil memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan perdesaan, terutama melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang tepat, industri mikro kecil dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pertumbuhannya.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa industri mikro kecil dapat berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan perdesaan melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan industri ini sangat tergantung pada akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, dan kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, pengembangan industri mikro kecil yang terarah dan terintegrasi dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan perdesaan

2.2.4. Kebijakan Makroekonomi, Karakteristik Lokal dan Kemiskinan Perdesaan

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan makroekonomi dan karakteristik lokal terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Beberapa studi mengkaji bagaimana kebijakan fiskal, desentralisasi, dan pengeluaran pemerintah memengaruhi kemiskinan perdesaan (Hafizhah et al., 2022; Qudri & Sari, 2024). Selain itu, beberapa peneliti juga memasukkan variabel karakteristik lokal seperti sumber daya manusia, kelembagaan koperasi, dan status desa untuk melihat pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan (Khofifah & Hayati, 2024; Kamagi et al., 2024). Secara umum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut mengaplikasikan metode regresi linier berganda, model data panel, serta analisis ekonometrika lainnya untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan makroekonomi dan karakteristik lokal terhadap kemiskinan (Gunawan et al., 2024; Suherman et al., 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu umumnya menggunakan model regresi linier yang berfokus pada pengaruh variabel independen seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Desa, serta pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan (Sebayang et al., 2023; Khofifah & Hayati, 2024). Selain itu, terdapat pula penelitian yang menggunakan model data panel dinamis untuk mengatasi masalah endogenitas yang mungkin muncul dalam pengujian hubungan antara kebijakan makroekonomi dan karakteristik lokal terhadap kemiskinan (Gunawan et al., 2024; Suherman et al., 2024). Beberapa penelitian lain juga mengaplikasikan metode Error Correction Model (ECM) dan Generalized Method of Moments (GMM) dalam mengukur dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan tersebut (Qudri & Sari, 2024).

Perbandingan antara pendekatan penelitian terdahulu dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan model yang lebih komprehensif melalui pengintegrasian variabel intervening. Penelitian sebelumnya

umumnya lebih berfokus pada analisis pengaruh langsung dari kebijakan makroekonomi atau karakteristik lokal terhadap kemiskinan, tanpa mempertimbangkan hubungan kompleks yang mungkin terjadi di antara variabel-variabel tersebut.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi model Fixed Effects (FE) dan Random Effects (RE) untuk mengkaji pengaruh simultan dari kebijakan makroekonomi, yang diwakili oleh Dana Desa dan Inflation Targeting Framework, serta karakteristik lokal, meliputi sumber daya manusia, kelembagaan koperasi, dan status desa, terhadap kemiskinan perdesaan. Belum banyak studi yang mengintegrasikan dampak simultan dari kebijakan fiskal mikro (Dana Desa) dan kebijakan moneter makro (ITF) terhadap kemiskinan perdesaan dalam satu kerangka model empiris yang mempertimbangkan heterogenitas antar wilayah. Penggunaan model FE dan RE memungkinkan identifikasi hubungan kausal yang lebih kompleks, termasuk pengaruh tidak langsung antar variabel yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh ini, penelitian diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari studi-studi sebelumnya yang cenderung hanya mengukur pengaruh langsung kebijakan makroekonomi atau karakteristik lokal terhadap kemiskinan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang lebih mendalam dalam memahami fenomena kemiskinan perdesaan di Indonesia, dengan menawarkan perspektif baru melalui analisis simultan yang lebih holistik dan metodologi yang lebih kuat.